

Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi dan Peluang Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan Demokratik

Aryanta Nugraha

✓ Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokratisasi
Indonesia

Prayudi

Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Pembebasan Wartawan Metro TV di
Irak

Mala Mardialina

Dampak Penguatan Usaha Mikro terhadap Penguatan Perempuan
(Studi pada Kelompok Perempuan Usaha Mikro di Propinsi DIY)

Asih Marini Wulandari

Ida Susi Dewanti

Kewirausahaan, Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Humam Santosa Utomo

Vladimir Putin dan Kebijakan Luar Negeri *Near Abroad* Rusia: Perspektif Kawasan

June Cahyaningtyas

INTERNET POLITIK: ANALISIS HISTORIS PERAN TEKNOLOGI MEDIA BARU DALAM DEMOKRATISASI INDONESIA

Prayudi

Jurusan Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

E-mail: prayudi_ahmad@yahoo.com

Abstract

The democratization process in Indonesia shows how Indonesia mass media play pertinent roles. They shaped public opinion how authoritarian regime which had ruled for more than 32 years had given bad influence to the democratization process and therefore political transformation was necessary. It is then interesting to analyze how the media play role in the political transformation process. The emerging of internet as new media technology at the end of New Order regime had contributed to the political transformation process. This paper examines historical perspective of internet and its role in Indonesia political transition.

Key words: internet, democratization

Pendahuluan

Internet menyatukan materi teks, audio dan visual, termasuk musik, radio dan film dalam sebuah lingkungan multimedia interaktif, potensi yang terus disadari seiring dengan ketersediaan jaringan frekuensi yang terus meningkat. Internet sebagai suatu bentuk komunikasi massa baru bersifat interaktif. Menurut Mc Quail:

"Internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki teknologi, cara menggunakan, lingkup pelayanan dan isi, dan *image* tersendiri...Internet tidak dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan tunggal, tapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi, khususnya *service provider* dan badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet (2000:28-29)."

Coombs (1998) menyatakan bahwa internet telah menjadi media komunikasi yang berharga bagi para aktivis ketika berhadapan dengan kelompok penguasa, baik ekonomi maupun politik. Aktivis dapat menempatkan posisi isu mereka dengan baik pada sebuah situs web, di mana dapat diakses oleh pengguna aktif internet

yang punya ketertarikan sama. Situs web memberikan jangkauan global bagi penyebaran informasi, evaluasi dan pesan kebijakan. Semua ini dapat diperbaharui secara instan. Sebagai sebuah media, internet telah menjadi media baru selain media *mainstream* (suratkabar, radio, dan televisi) dan memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses politik.

Jaringan terintegrasi dan saling terhubung menjadikan internet teknologi media baru yang sarat keunggulan. Internet merupakan jaringan dari jaringan komputer yang saling terhubung dan dapat diakses oleh publik dan tersebar luas di seluruh dunia yang menyampaikan data paket dengan menggunakan Protokol Internet (*Internet Protocol*). Internet merupakan sebuah 'jaringan dari jaringan' yang terdiri dari jutaan jaringan domestik, akademik, bisnis dan pemerintah yang lebih kecil, yang secara bersama membawa beragam informasi dan layanan, seperti surat elektronik, percakapan online, transfer arsip, dan halaman web dan dokumen lainnya dari *World Wide Web* yang saling terhubung (<http://en.wikipedia.org/wiki/internet>).

Internet merupakan jaringan komputer yang dipersatukan melalui satu protokol yang disebut

Internet Protocol (IP). Protokol dapat diumpamakan seperti sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Dengan protokol ini, setiap bagian dari komputer yang berhubungan dengan internet dapat saling bertukar data tanpa mengalami hambatan. Banyaknya jaringan yang ada didalam internet, memudahkan akses pencarian informasi dan komunikasi interaktif dengan menggunakan fasilitas yang ada didalamnya. Jika melihat internet sebagai media informasi, bagaimana hubungannya dengan proses politik?

Sebagaimana diakui secara luas bahwa, “praktek demokratik (atau tidak demokratik) politik secara nasional dan internasional, semakin bergantung pada media” (McQuail, 2000: 4). Yang kemudian perlu diperdebatkan adalah bagaimana sesungguhnya media dan transformasi politik saling berhubungan, bagaimana media memberikan kontribusi bagi terjadinya proses transformasi politik dan bagaimana proses transformasi politik juga mempengaruhi perkembangan media dalam memberitakan isu politik. Lebih jauh juga perlu dicermati hal-hal yang memberikan kontribusi bagi peran media dalam proses demokratisasi.

Perubahan dalam hal sikap dan tingkat kontrol terhadap informasi pada paruh kedua tahun 1990-an membawa konsekuensi yang cukup signifikan dalam perubahan politik di Indonesia. Tumbanganya rejim Orde Baru pada Mei 1998 secara signifikan dipengaruhi oleh peran media. Peran media, baik *mainstream* maupun *underground*, telah membentuk opini di kalangan publik betapa rejim yang telah berkuasa selama 32 tahun tersebut telah membawa pengaruh buruk pada proses demokratisasi di Indonesia; dan oleh karenanya transformasi politik diperlukan. Transformasi politik terjadi dan memiliki dampak luas ketika mendapat dukungan dari media. Yang perlu dicermati adalah bagaimana peran media pada proses transformasi politik itu terjadi?

Satu fenomena menarik dalam proses transformasi politik menjelang tumbanganya rejim Orde Baru adalah kemunculan internet sebagai media alternatif yang digunakan aktivis politik dalam membangun jaringan dan melakukan koordinasi. Perkembangan internet yang pesat sebagai teknologi media baru agaknya tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh rejim

Orde Baru dan oleh karenanya kurang mendapatkan perhatian dari badan pemerintah, seperti Departemen Penerangan dan pihak militer.

Tulisan ini menganalisis secara historis kemunculan teknologi media baru atau internet dan perannya dalam politik Indonesia di saat-saat terakhir tumbanganya rejim Orde Baru. Argumen yang dimunculkan adalah berkembangnya peran internet dalam proses transformasi politik (*internet politik*) dipengaruhi oleh proses politik yang terjadi di Indonesia, khususnya kebijakan pemerintah terhadap institusi media massa. Secara khusus, faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan internet politik dianalisis dalam tulisan ini. Argumen lainnya adalah bahwa internet politik memiliki dampak utama pada kalangan elit politik, dan selebihnya berdampak pada sebagian masyarakat, seperti mahasiswa. Internet tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai sarana bagi aktivitas dan koordinasi diantara kalangan oposisi yang terus meningkat dan menguat menentang Suharto.

Perkembangan Internet di Indonesia

Newbold *et al.* (2002: 379) menyatakan bahwa internet menandai revolusi di bidang komunikasi. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini:

- Kombinasi sistem komunikasi dan komputer memungkinkan pengiriman dan pemindahan sejumlah besar data berdasarkan asas *many-to-many* dan *one-to-many*.
- Sifat komunikasi yang cepat dan lintas batas di era digital memungkinkan beragam bentuk informasi dan jaringan kerja yang tidak pernah dikenal sebelumnya.
- Ada penekanan pada konektivitas dan keahlian yang diperlukan untuk menjadi peserta aktif (daripada konsumen pasif) dalam lingkungan komunikasi ini.

Perkembangan internet sebagai teknologi media baru (di awal perkembangannya dikenal dengan terminologi *information superhighway*) masuk dan berkembang di Indonesia pada awal tahun 1990-an, hampir bersamaan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan teknologi informasi dan komunikasi baru ini sebagai bagian dari obsesi kebijakan pembangunan. Banyak pekerjaan pengembangan *information superhighway* dipegang oleh 'anak-anak Habibie', generasi ahli teknologi yang dilatih di luar negeri dan lokal yang mengambil keuntungan dari kedekatan dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi (1978-1998), BJ Habibie. Adalah BJ Habibie, menteri Indonesia pertama yang memiliki *homepage* di Internet (Sen dan Hill, 2000: 195).

Embrio perkembangan internet dapat ditelusuri hingga tahun 1986 ketika Dewan Riset Nasional, di bawah supervisi Habibie, merekomendasikan pengembangan sains dan pelayanan teknologi informasi. Pada tahun 1989 aktivitas ini mengkristal menjadi rancangan jaringan informasi, dikenal dengan IPTEKnet. Rancangan ini melibatkan beberapa universitas negeri seperti ITB, UGM, ITS dan UI, yang berkolaborasi dalam pembentukan jaringan antar universitas, UniNet, dan didanai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada

bulan April 1993, Komite Perencanaan IPTEKnet melaksanakan uji coba prototipe Micro-IPTEKnet, meliputi enam instrumen pemerintah dan beberapa universitas besar dan institut penelitian (Sen dan Hill, 2000: 195-196). Dengan demikian, pemanfaatan internet sebagai media informasi baru benar-benar dilakukan pada sekitar pertengahan tahun 1990-an. Pada pertengahan tahun 1990-an pula berdiri perusahaan penyedia jasa layanan internet komersial yang pertama, RADNET. Institusi media massa pun baru melirik internet sebagai media alternatif paska dibreidelnya beberapa media berita seperti *Tempo*, *Editor* dan *Detik* pada Juni 1994. Hal ini akan dibahas pada bagian berikutnya dalam tulisan ini.

Menurut Winters (Gazette, Vol.64 [2], 2002: 112), penggunaan internet di Asia mulai meningkat pesat selama paruh kedua tahun 1990-an. Pada tahun 1999, penggunaan internet di daerah urban meningkat dua sampai tiga kali lipat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran aktif masyarakat untuk menggunakan teknologi media baru sebagai

Tabel 1. Pertumbuhan penggunaan internet di Asia Pasifik (dalam persentase)

		Penggunaan Periode Juli 1997 – Juni 1998	Penggunaan Periode Juli 1998 – Juni 1999	Pengguna (dalam ribuan)
Singapore		24	32	950
Hongkong		12	16	1051
Taiwan		11	14	2100
Malaysia	(Semenanjung Malaysia)	5	8	860
Filipina	(metro Manila)	2	8 (Jan-Des 98)	550
China	(Beijing, Shanghai, Guangzhou) (30 kota)	2 -	7 6	1180 2630
Indonesia	(Jakarta + 10 kota)	1	3	790
Thailand		1	2	830

Sumber: Jeffrey A. Winters. 'The Political Impact of New Information Sources and technologies in Indonesia'. *Gazette: The International Journal for Communication Studies*. Volume 64 (2), 2002. London: Sage Publications. Hal. 112.

bagian dari aktivitas keseharian mereka, atau mencari tahu perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di daerah atau negara mereka.

Sebuah survei yang dilakukan oleh AC Nielsen pada 1999 memberikan beberapa indikator perkembangan penggunaan internet di Asia Pasifik sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Walaupun Indonesia berada pada posisi ke tujuh dengan hanya 3% populasi Jakarta ditambah dengan 10 kota besar (dengan jumlah total 790.000 orang), baik tingkat penggunaan dan pertumbuhan masih berimbang jika dibanding dengan Filipina (yang hanya mengukur Manila). Juga perlu dicermati bahwa Indonesia naik tiga kali lipat dalam hal penggunaan Internet pada tahun 1999 terlepas dari fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia yang tidak bisa memulihkan krisis ekonomi yang muncul pada tahun 1997.

Jumlah pengguna 790 ribu orang ini dapat dikatakan fantastis jika melihat angka 15 ribu pengguna internet pada akhir tahun 1995 yang dilayani oleh lima penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider*). Jumlah ini terus berkembang pesat dan pada akhir tahun 1996 telah mencapai 40 ribu pengguna, dengan sekitar 22 penyedia jasa layanan internet terdapat pada Direktorat Jenderal Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Satu fenomena menarik dari data statistik diatas adalah bagaimana publik telah menyadari arti penting informasi dan secara aktif mencari informasi yang dibutuhkan.

Mahasiswa merupakan salah satu pengguna internet yang cukup aktif menggunakan teknologi media baru ini. Kafe internet dimana pengguna bisa mengakses internet cukup banyak berkembang di daerah-daerah yang banyak berkembang perguruan tinggi, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Sen dan Hill mengidentifikasi bagaimana kafe internet dibangun di sekitar beberapa kampus terkenal di Yogyakarta dan selalu penuh oleh mahasiswa sejak awal dibukanya pada September 2006 (2000: 1998-1999).

Perkembangan penggunaan internet ini cukup menggembirakan jika dilihat dari awal kemunculannya dan tingkat kontrol terhadap informasi yang cukup kuat dari rejim Orde Baru. Secara politis, perkembangan internet pada tahun 1990an tidak terlepas dari era keterbukaan

yang diusung oleh pemerintahan Orde Baru sebagai konsekuensi dari deregulasi ekonomi yang diikuti dengan deregulasi politik pada tahun 1989. Walaupun harus diakui bahwa era keterbukaan ini tidak berlangsung lama dan semua media tetap berada dalam kontrol ketat Departemen Penerangan.

Berdasarkan survei yang sama, terdapat temuan bahwa di Indonesia terdapat pola yang kuat penggunaan internet di kalangan urban. Akses internet di luar rumah, dengan kebanyakan orang menggunakan jam dan perangkat komputer kantor untuk mengecek email atau penelusuran Web. Hal ini dapat dicermati pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Lokasi akses internet di Indonesia
(dalam persen)

Kantor	52
Kafe Internet	26
Kampus/sekolah	21
Rumah/lain-lain	1

Sumber: Jeffrey A. Winters. 'The Political Impact of New Information Sources and technologies in Indonesia'. *Gazette: The International Journal for Communication Studies*. Volume 64 (2), 2002. London: Sage Publications. Hal. 113.

Koneksi internet pada periode ini masih dianggap barang mahal, sehingga sangat jarang individu memiliki koneksi internet di rumahnya. Selain itu, tingkat kesadaran pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari belum begitu baik. Itulah sebabnya ketika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa dengan jumlah pengguna internet yang 'hanya' 790 ribu jiwa menjadi tidak sebanding. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan internet juga memanfaatkan seoptimal mungkin keunggulan internet dalam proses transformasi politik sebagai bagian dari demokratisasi Indonesia.

Satu fenomena menarik dari perkembangan internet di Indonesia di awal perkembangannya adalah bahwa internet yang dapat diakses oleh

publik secara luas telah memberikan satu media baru bagi masyarakat. Media ini menjadi alternatif kebutuhan informasi masyarakat yang pemanfaatannya meningkat dari tahun ke tahun. Jika demikian, bagaimana internet berperan dalam proses transformasi politik dan bagaimana proses politik mempengaruhi kemunculan internet itu sendiri?

Tekanan Orde Baru dan Kemunculan Internet Politik

Dampak penggunaan internet dalam aktivitas politik di tiap negara beragam. Internet, misalnya, memainkan peran penting dalam mencegah kerusuhan meluas di Chiapas, Mexico, karena dunia luar secara konstan terinformasikan mengenai perkembangan yang terjadi di daerah yang biasanya jarang mendapatkan perhatian media global. Winters juga mencatat bahwa internet juga merupakan sumber informasi utama pada pemberontakan yang terjadi di propinsi Thai Binh di Vietnam pada tahun 1997 dan 1998. Pemerintah Vietnam memblokir semua reporter memasuki propinsi tersebut dan menempatkan militer. Namun beberapa informasi berhasil keluar via internet kepada komunitas Vietnam di luar negeri mengenai perkembangan yang terjadi propinsi tersebut (*Gazette*, Vol.64 [2], 2002: 113).

Bagaimana kasus internet politik di Indonesia? Perkembangan internet politik tidak bisa dipisahkan dari tekanan politik Orde Baru yang kuat. Konteks politik yang berkembang baik di bidang pemerintahan maupun relasi antara negara dan pers mempengaruhi kemunculan internet politik di Indonesia.

Kombinasi militer dan teknokrat di bawah Orde Baru telah menciptakan karakteristik yang tipikal dengan negara pos kolonial (*post colonial state*). Militer dengan komando hirarkis dan peran politik, cenderung memerintah secara otoriter dengan pendekatan kekerasan untuk mengamankan rejim. Militer juga menempatkan perwakilannya dari birokrasi puncak hingga tingkat desa (Prayudi, 2003: 26). Cribb dan Brown, 1995, dan Liddle (dalam Emmerson, 1999)) menggambarkan kondisi ini sebagai karakter korporat dari Indonesia versi Suharto dengan mana wewenang mengalir dari atas melalui institusi negara.

Pada sisi lain, teknokrat membangun birokrasi yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan Suharto dengan mengendalikan semua sektor penting dan krusial. Oleh karena itu, negara di bawah Suharto memiliki posisi yang kuat dalam hubungan dengan kekuatan politik masyarakat luas. Struktur birokratis dan autoritarian yang dibentuk Suharto telah digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan secara ekonomi memperkuat patronasenya. Beberapa kasus seperti Malapetaka 17 Januari 1974 yang juga dikenal dengan peristiwa Malari, Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan penyerangan Kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 27 Juli 1976, merupakan bukti bagaimana dinamika politik yang mengambil sikap oposisi terhadap negara dihadapi dengan menggunakan pendekatan represif (Prayudi, 2003: 27).

Orang-orang yang mengkritik Suharto secara progresif dipinggirkan baik dari sisi politik, ekonomi dan sosial. Salah satu kritik terhadap rejim datang dari sekelompok orang yang berafiliasi dengan politik tahun 1950an, dikenal dengan Petisi Limapuluh. Terdiri dari lima puluh orang mantan politisi, pejabat militer dan *public figure*, kelompok ini menyampaikan petisi pada MPR keberatan dengan klaim Suharto bahwa nasionalisme, agama, dan ideologi lainnya seperti Marxisme merupakan 'sistem nilai masa lalu'. Para penyampai petisi ini menyatakan bahwa Suharto telah secara arogan menginterpretasi ideologi Indonesia dan bahwa dia tidak memiliki hak untuk itu; dia hanyalah pelaksanaan mandat MPR dan tidak bisa baik secara hukum maupun moral memaksa orang Indonesia lainnya mengikuti visinya tentang negara (Cribb sN Brown, 1995). Sebagai tindakan balasan, Suharto mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap para penyampai petisi tersebut, melarang pers melakukan peliputan terhadap aktivitas mereka dan mengeluarkan mereka yang memiliki kepentingan bisnis dari daftar kontrak dan ijin pemerintah. Kasus ini menjadi contoh politik kekerasan pervasif yang dilakukan rejim Orde Baru.

Tekanan politik serupa juga dilakukan rejim Orde Baru terhadap pers Indonesia. Sejak awal kepemimpinannya, Suharto menekan pers untuk menjadi penjaga keamanan nasional dari

ancaman internal dan eksternal. Sebagai penjaga Pancasila, pers harus 'bebas namun bertanggung jawab', kontras dengan pers Barat yang 'liberal' yang dianggap 'bebas dan tidak bertanggung jawab'. Orde Baru menekan pers untuk menjadi mitra dalam mempercepat pembangunan. Konsekuensinya, pers harus mendukung pemerintah atau netral dalam perdebatan politik. Sebagian besar editor media terpaksa menerima tekanan ini. Mereka yang menolak, terancam ditutup oleh pemerintah.

Hubungan antara pers dan negara selama era Orde Baru melalui beragam bentuk. Namun, pers cenderung diperlakukan sebagai alat agitasi politik Orde Baru, khususnya pasca peristiwa Malari 1974. Perkembangan pers di era Orde Baru dapat dicermati dari dua aspek. Pertama, kebijakan negara terhadap pers dalam bentuk sistem pers dan undang-undang pers. Sistem pers menggambarkan struktur pers berdasarkan ideologi negara Pancasila, sedangkan Undang-Undang Pers dimaksudkan sebagai aturan bermain bagi pers. Permasalahan dengan Undang-Undang ini adalah pers diberikan perasaan kebebasan karena tidak akan ada pemberangusan media, tapi di sisi lain, setiap surat kabar harus memiliki Izin Terbit dari Departemen Penerangan dan Izin Cetak dari KOPKAMTIB, yang kemudian diganti dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kedua, pemberangusan pers nasional selama periode tertentu merepresentasikan kekuatan negara terhadap pers. Dalam konteks ini, pers dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial politik dalam masyarakat yang dapat membahayakan kekuatan negara. Bagaimana kedua hal ini berhubungan dengan kemunculan internet politik di Indonesia?

Pertama, melemahnya rejim Orde Baru berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Suharto. Menguatnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kurun waktu satu dekade menjelang pergantian kekuasaan nasional berdampak pada perekonomian yang tidak berimbang antara yang kaya dan miskin. Sehingga, ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, masyarakat dan komunitas kritis seperti mahasiswa melihat Suharto lebih sebagai faktor negatif dan beban daripada faktor pendukung pemulihan krisis. Hal ini menguatkan

kelompok-kelompok politik seperti mahasiswa, kelas menengah dan elit politik untuk memperkuat jaringan berkoordinasi. Mereka menjadikan internet sebagai media alternatifnya.

Salah satu yang menjadi ganjalan pihak militer dan Departemen Penerangan adalah keberhasilan dari media diskusi surat elektronik (*email discussion list*) 'Indonesia-1', yang dikenal dengan *apakabar*, dimoderatori oleh John MacDougall di Maryland, USA. Pada tahun 1994-1995 *apakabar* dianggap oleh sebagian besar aktivis di LSM sebagai media berharga dalam menyebarkan materi dan sumber berita domestik dan internasional penting yang tidak disensor. Internet telah menjadi mekanisme yang luar biasa untuk menyatakan opini dan gagasan secara terbuka dan bebas (Sen dan Hill, 2000: 200), mengingat kuatnya kontrol informasi dari rejim Orde Baru.

Salah satu peristiwa politik yang dikirim (*posting*) ke *email discussion list* ini dalam hitungan jam adalah serangan 27 Juli 1996 ke kantor pusat PDI di Jakarta. Pengurus PDI sendiri mengirim surat ke *email discussion list* ini dengan pesan 'mengajak saudara seperjuangan di seluruh negeri untuk menyebarluaskan detail penyerangan secepat mungkin, baik via email atau dicetak karena saat ini semua sumber informasi telah ditekan untuk tidak menyebarkan berita tersebut'. Hal ini menunjukkan bagaimana internet telah menjadi media alternatif yang justru lebih kritis disaat *mainstream* media tidak berdaya menghadapi tekanan politik Orde baru.

Kedua, ketatnya kontrol rejim Orde Baru berdampak pada dibreidelnya tiga media cetak, *Tempo*, *Editor* dan *Detik* pada bulan Juni 1994. Namun, hal ini justru menjadi momentum bagi berkembangnya internet sebagai media alternatif yang kritis. *Tempo* misalnya, setelah dibreidel dan sebagian karyawannya mendirikan Majalah *Gatra* yang salah satu pemegang sahamnya adalah Bob Hasan, kroninya Suharto; sebagian karyawan *Tempo* yang idealis mendirikan *Tempo Interaktif*, sebuah versi online dari Majalah *Tempo*. Para karyawan *Tempo* melihat celah hukum yang belum menjadi perhatian pemerintah dan pihak militer. Bahkan, melalui media online ini, *Tempo* dapat menyampaikan berita yang tidak bisa mereka tulis dalam format cetak dikarenakan adanya kontrol penguasa.

Pada sekitar tahun 1994 diperkirakan mulai berkembang jurnalisme *online* di Indonesia sebagai konsekuensi pembreidelan tanpa peringatan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru terhadap tiga media cetak tersebut. Mengapa harus media online? Menurut Bierhoff et al., sejumlah informasi yang tidak dapat dikeluarkan di media cetak karena faktor ruang dan waktu, dapat disediakan di *online media*, seperti dokumen, undang-undang, debat, informasi statistik dan pidato (www.ejc.nl). Hal senada juga disampaikan oleh Mc Adams yang menyatakan bahwa salah satu keunggulan *online media* adalah potensinya untuk menyampaikan segala macam informasi yang mungkin tidak sesuai dengan media cetak; selain juga menawarkan informasi yang belum pernah dilakukan surat kabar dan menyediakannya dari hari ke hari (www.sentex.net/~mmcadams/invent/invent5.html).

Namun kualitas jurnalisme *online* pada saat itu masih dapat dipertanyakan dikarenakan format internet yang berbeda dengan media cetak sehingga mempengaruhi teknik penulisan berita. Satu temuan menarik dari Jo Bardoel dalam penelitian jurnalisme *online* di Belanda yang bisa dikatakan serupa dengan perkembangan jurnalisme *online* di Indonesia adalah bahwa kebanyakan berita yang muncul di internet dapat dikategorikan ke dalam jenis 'parasit' atau *parasitic (shovelware)*. Artinya bahwa jurnalis *online* melakukan pencarian informasi di internet (*surfing*), menulis ulang cerita dan mengelola korespondensi email mereka hampir secara eksklusif, yang menyebabkan pekerjaan mereka cenderung berorientasi pada media atau *medium-driven* (*Gazette*, Vol.64 [5], 2002: 503).

Meskipun demikian, harus diakui bahwa berkembangnya situs informasi seputar proses politik berdampak pada menguatnya jaringan antar aktivis yang menentang Suharto dalam melakukan koordinasi. Internet menjadi alternatif karena belum kuatnya kontrol informasi yang dilakukan Orde Baru terhadap media ini, disamping keunggulan internet yang cepat dari sisi waktu dan untuk beberapa situs, informasinya dapat dianggap akurat. Lemahnya kontrol pemerintah dapat dicermati dari pernyataan Budiono Darsono, editor *detik.com* salah satu situs web pemberitaan dan data yang paling terkemuka di Indonesia. Ia menyatakan:

"Pemerintahan Suharto pada waktu itu memang memberikan keleluasaan atas izin operasi ISP. Aturannya, yang diizinkan memperoleh izin ISP justru perusahaan kecil yang pengelolanya anak muda. Perusahaan besar (konglomerat) tidak diizinkan. Kemudahan memberikan izin operasi ISP ini memang berbanding terbalik. Pemerintahan Suharto, nampaknya mengabaikan internet sebagai jaringan global yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan sangat luas. Pemerintahan Suharto nampaknya lebih melihat internet sebagai komputer atau hanya sekedar teknologi. Bahwa dibalik teknologi internet itu unsur informasi yang dikandungnya sangat dominan, diabaikan" (dalam Winters, *Gazette*, Vol.64 [2], 2002: 114).

Lemahnya kontrol terhadap teknologi media baru menjadi solusi ketika media *mainstream* ditekan oleh pemerintah. Bahkan ketika pemerintah memaksakan adanya *tv pool* untuk mengontrol arus informasi pada media televisi seiring dengan gencarnya demonstrasi menjelang tumbanganya rejim Orde Baru, internet justru menjadi media unggulan penyebaran informasi kritis yang tidak bisa dicegah oleh pemerintah. Mereka yang menggunakan internet untuk mendistribusikan informasi politik yang kritis yakin jika saluran mereka diputus oleh pemerintah, informasi dapat dengan cepat diarahkan ke saluran lain. Sen dan Hill (2000: 202) memberikan satu contoh kemampuan internet untuk menantang peraturan atau batas yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru adalah tetap eksisnya Partai Rakyat Demokratik yang oleh pemerintah merencanakan kerusuhan 27 Juli 1996. Meskipun pimpinannya ditahan dan diintimidasi, partai tersebut tetap mengirimkan (*posting*) informasi ke internet atau *apakabar* dari sebuah ISP diluar Indonesia. Hal ini menyiratkan kehadiran politik partai tersebut secara nasional dan internasional dan dapat dianggap melecehkan pemerintah; juga menunjukkan susahnyanya mengontrol internet sebagai teknologi media baru.

Selain *email discussion list* *apakabar*, *Indo-News* mulai *online* pada Agustus 1994 dan mendistribusikan antara 50 sampai 120 kiriman berita dan komentar tentang Indonesia setiap harinya. Dapat diakses di www.indo-news.com, jasa layanan berita ini juga menyediakan situs

web dimana semua kiriman tersedia dan dapat diakses, juga tersedia layanan interaktif dengan mana pelanggan dapat mengirimkan pandangan mereka dan terlibat dalam sebuah diskusi atas isu-isu krusial.

Menarik untuk dicermati adalah kehadiran *detik.com* yang hadir dalam bahasa Indonesia dan *Joyo News Service* yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Walaupun didirikan setelah tumbangannya rejim Orde Baru (9 Juli 1998), *detik.com* telah menjadi sumber rujukan berita utama online hingga saat ini. Didirikan oleh mantan reporter dan editor media cetak Indonesia (khususnya majalah *Tempo* dan tabloid *Detik*), berita-berita kritis seputar politik dan ekonomi menjadi ciri khas *detik.com*. besarnya pengaruh *detik.com* terhadap pandangan politik masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat akses dan hit terhadap halaman berita *detik.com*, khususnya pada proses transformasi politik yang terjadi sekitar tahun 1998-1999.

Tabel 3
Tingkat akses halaman web dan hit
***detik.com* per hari**

	Akses halaman per hari	Hit per hari
September 1998	12.000	32.000
Desember 1998	60.000	100.000
Juni 1999	120.000	340.000
Oktober 1999	310.000	720.000
Desember 1999	363.000	1.320.000

Sumber: Jeffrey A. Winters. 'The Political Impact of New Information Sources and technologies in Indonesia'. *Gazette: The International Journal for Communication Studies*. Volume 64 (2), 2002. London: Sage Publications. Hal. 115.

Tabel 3 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam seberapa sering pengguna mengakses situs web *detik.com*. Sebagai situs web yang menyediakan informasi politik, tingkat akses yang cenderung meningkat secara signifikan dapat dipahami tingkat kebutuhan informasi politik pengguna cukup tinggi dan pada saat yang sama dapat dipahami pengguna menjadikan internet (*detik.com*)

sebagai salah satu sumber informasi terkini yang perlu diikuti perkembangannya. Terjadi peningkatan enam kali lipat jika dilihat data akses halaman pada Desember 1998 yang 'hanya' 60.000 menjadi 363.000 pada Desember 1999. Sedangkan hit per hari juga meningkat tajam yang tadinya hanya 100.000 kali pada Desember 1998 menjadi 1.320.000 kali pada Desember 1999. Terjadi peningkatan lebih tiga belas kali dalam waktu satu tahun. Hal ini juga menyiratkan tingkat keaktifan dalam mencari informasi politik lebih jauh yang tersedia pada halaman web.

Satu fenomena menarik juga, menurut Darsono, pada bulan September 1998, sekitar 70 persen pengguna yang mengakses *detik.com* tinggal di luar Indonesia, dan 30 persen di Indonesia. Pada Desember 1999, rasio ini berbalik; sekitar 75 persen pengguna yang mengakses *detik.com* tinggal di Indonesia, sedangkan 25 persen dari luar Indonesia (dalam Winters, *Gazette*, Vol.64 [2], 2002: 114). Hal ini menyiratkan keingintahuan akan perkembangan politik pasca tumbangannya rejim Orde Baru sangat tinggi dan internet menjadi sumber informasi tercepat yang bisa diakses di mana saja dan *detik.com* merupakan salah satu sumber informasi politik yang menjadi rujukan.

Sementara itu, *Joyo News Service* berkembang pada pertengahan tahun 1996 dalam upaya menginformasikan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Layanan informasi ini berkembang dengan secara selektif mengumpulkan artikel dari internet yang selanjutnya di sebar di kalangan pelanggan mailing list ini. Karena dalam bahasa Inggris beberapa organisasi internasional tercatat menjadi pelanggan atau penerima informasi ini seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan beberapa kalangan akademisi. Juga menarik karena ternyata pensiunan militer dan intelijen, anggota kongres Amerika dan beberapa pejabat di Pentagon dan CIA juga menjadi penerima informasi dari *Joyo News Service* ini. Mengutip pendapat Winters (*Gazette*, Vol.64 [2], 2002: 114), *Joyo News Service* merupakan sumber utama informasi yang akurat pada bulan-bulan menjelang kejatuhan Suharto pada Mei 1998.

Kesimpulan

Berkembangnya internet sebagai sumber media baru tidak terlepas dari tekanan politik yang dilakukan oleh Suharto baik terhadap kelompok masyarakat yang berposisi maupun terhadap pers. Situs web seperti *apakabar* mendapatkan banyak pengaruh. Fotokopian berita yang dicetak dari situs web disebarluaskan di kalangan aktivis dan masyarakat. Singkatnya berita yang tidak bisa ditemui pada media mainstream, dapat dengan mudah ditemukan di internet dengan tingkat informasi yang kritis dan akurat. Internet juga telah menjadi media konsolidasi antar aktivis dalam menggalang kekuatan menentang rejim otoriter Orde Baru.

Dapat diasumsikan pula bahwa proses politik yang berlangsung telah memicu munculnya internet sebagai media alternatif dalam penyebaran informasi pada publik dan saat bersamaan mempengaruhi proses politik yang berlangsung khususnya seiring dengan melemahnya kekuatan politik dan tumbanganya rejim Orde Baru. Dibreidelnya *Tempo*, *Editor* dan *Detik* dapat dicermati sebagai momen berkembangnya internet politik sebagai media alternatif. Kontrol rejim Orde Baru yang lemah terhadap teknologi media baru menjadi salah satu alasan berkembang pesatnya internet sebagai sarana berpolitik.

Tingkat akses informasi politik yang tinggi menjelang dan pasca tumbanganya rejim Orde Baru menyiratkan bagaimana teknologi media baru memberikan kontribusi dalam proses transformasi politik yang ada di Indonesia. Gerakan-gerakan bawah tanah menggunakan internet sebagai media penyebaran informasi. Pemberitaan di internet mempengaruhi citra Suharto dan memperkuat keinginan untuk menumbangkan rejim yang dalam sepuluh tahun terakhir pemerintahannya penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kebutuhan informasi perubahan politik yang tinggi dan cepat menjadikan internet sumber informasi utama yang kritis.

Daftar Pustaka

Buku

Bardoel, Jo. "The Internet, Journalism and Public Communication Policies".
Gazette: The International Journal for

Communication Studies. Volume 64 (5),
2002. London: Sage Publications

Coombs, W. Timothy. 1998. 'The Internet as a Potential Equalizer: New Leverage for Confronting Social Irresponsibility'.
Public Relations Review, Vol. 24

Cribb, Robert & Colin Brown, 1995, *Modern Indonesia: A History since 1945*, Longman: London and New York

Liddle, R. William, 'Regime: The New Order', Donald K. Emmerson (Ed.), 1999, *Indonesia Beyond Suharto*, M. E. Sharpe, Inc.: New York

McQuail, Denis. 2000. *Mass Communication Theory* (Edisi Keempat). London: Sage Publications

Newbold, Chris, Oliver Boyd-Barret and Hilde Van Den Bulck (Eds.). 2002. *The Media Book*. London: Arnold

Prayudi. (2003). *Press Coverage of Ethnic Violence*. Thesis master tidak diterbitkan. RMIT University, Melbourne, Australia

Sen, Krisna dan David T. Hill. 2000. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Melbourne: Oxford University Press

Sen, Khrisna. 'Indonesia: Media and the End of Authoritarian Rule'. Dalam Monroe E. Price, Beata Rozumilowicz, Stefaan G. Verhulst (Ed.). 2002. *Media Reform: Democratizing The Media, Democratizing The State*. London: Routledge

Winters, Jeffrey A. 'The Political Impact of New Information Sources and technologies in Indonesia'. *Gazette: The International Journal for Communication Studies*. Volume 64 (2), 2002. London: Sage Publications

Situs Web

<http://en.wikipedia.org/wiki/internet>

Bierhoff, Jan, Monique van Dusseldorp, dan McAdams, Melinda, *Driving a Newspaper On the Data Highway*, [Online]. Available at: <http://www.sentex.net/~mmcadams/invent/invent5.html>

Scullion, Roisin, *The Future of the Printed Press: Challenges in a Digital world*, [Online]. Available at: <http://www.ejc.nl>